

TESIS

PENGEMBANGAN PROGRAM PERSIAPAN Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Disusun Oleh:

NAMA : WIDAD MAULANA
NPM : 1864002157
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PRGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

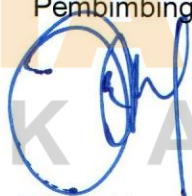
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Widad Maulana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1864002157
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Pengembangan Program Persiapan
Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Development of Retirement Preparation
Program for Civil Servants at the Secretariat
General of the Regional Representatives
Council of the Republic of Indonesia

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 12 Juli 2021

Pembimbing,



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si.)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Widad Maulana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1864002157
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Pengembangan Program Persiapan
Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Juli 2021
Pukul : 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. :
Sekretaris : Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc. :
Anggota : Dr. Asropi, M.Si. :
Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, M.Si. :

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Widad Maulana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1864002157
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Pengembangan Program Persiapan
Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Program Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 12 Juli 2021




Widad Maulana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kebaikan dan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengembangan Program Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Shalawat dan salam terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang begitu banyak, dimana salah satunya adalah keutamaan dalam menuntut ilmu. Hal tersebut menumbuhkan semangat penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si. yang telah memberikan begitu banyak ilmunya, meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan, saran serta arahan bagi penyelesaian tesis ini. Selain itu tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta bantuan dalam penyelesaian tesis ini yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A., Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan serta pelayanan dalam penyelesaian studi
2. Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A., Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc., dan Dr. Asropi, M.Si., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan begitu banyak masukan untuk perbaikan tesis ini

3. Para Dosen STIA LAN yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan bimbingan
4. Para pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI. Bapak Sekretaris Jenderal, Ibu Deputi Bidang Persidangan, Bapak Deputi Bidang Administrasi, Ibu Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian, Ibu Kepala Bagian Pengembangan SDM, Ibu Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Ibu Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM, Bapak Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian serta pejabat serta pegawai lainnya. Khususnya Bapak Kabag dan Kasubag serta rekan-rekan di Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.
5. Bapak dan Ibu pensiunan Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi-informasi seputar penulisan tesis ini
6. Kedua orang tua, istri, dan anak-anak yang dengan ketulusannya telah memberikan doa, dorongan, motivasi, dan bantuan yang begitu banyak
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta angkatan 2018

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu masukan, kritik, dan saran perbaikan terhadap tesis ini akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, 12 Juli 2021

Widad Maulana

ABSTRAK

Pengembangan Program Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Widad Maulana

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa program persiapan pensiun di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia belum optimal. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagaimana desain pengembangan program persiapan pensiun di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap 9 orang informan kunci dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan belum optimalnya program persiapan pensiun adalah tidak sesuai program yang ada dengan minat dan kemampuan peserta. Kemudian terlihat bahwa program persiapan pensiun yang dijalankan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari segi durasi waktu masih sangat kurang dimana total pelaksanaan program kurang lebih 15 jam. Kemudian juga terlihat bahwa program yang ada menitikberatkan pada program kewirausahaan dan kurang memaksimalkan dan memperhatikan aspek lainnya.

Kata kunci : Pensiun; Pengembangan; Program Persiapan Pensiun

ABSTRACT

Development of Retirement Preparation Program for Civil Servants at the Secretariat General of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia

Widad Maulana

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to find out why the retirement preparation program at the Secretariat General of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia has not been optimal. In addition, this study also aims to provide input on how to design the development of retirement preparation programs at the Secretariat General of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia. The method used is the case study method. Data collection techniques used are interviews with 9 key informants and document review. The results of the study indicate that what causes the retirement preparation program to be not optimal is the incompatibility of the existing program with the interests and abilities of the participants. Then it can be seen that the retirement preparation program carried out at the Secretariat General of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in terms of time duration is still very lacking where the total program implementation is approximately 15 hours. Then it is also seen that the existing program focuses on entrepreneurship programs and does not maximize and pay attention to other aspects

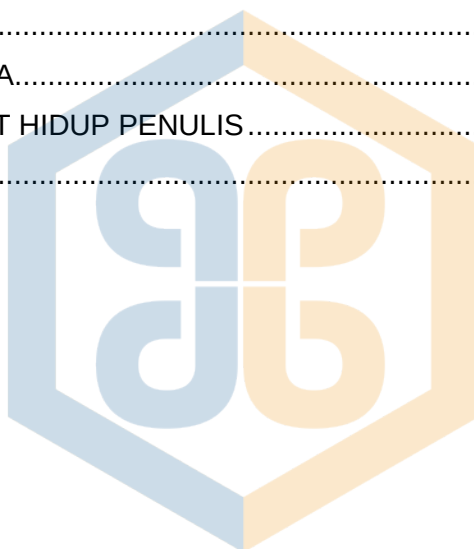
Keywords: Retirement; Development; Retirement Preparation Program

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	15
1. Tinjauan Kebijakan.....	15
2. Manajemen Sumber Daya Manusia	19
a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	19
b. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.....	20
3. Pensiun.....	24
a. Pengertian Pensiun.....	24
b. Jenis Pensiun.....	28
c. Fase Pensiun	28
d. Psikologi Pensiunan.....	29
e. Sistem Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.....	32
f. Program Persiapan Pensiun.....	33

g. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pensiun	43
h. Evaluasi Program Persiapan Pensiun	44
i. Pengembangan Program Persiapan Pensiun	46
4. Program Persiapan Pensiun di Luar Negeri	47
a. Program Persiapan Pensiun di Brazil	47
b. Program Persiapan Pensiun di Norwegia	49
c. Program Persiapan Pensiun di Korea Selatan.....	52
C. Kerangka Berpikir	54
BAB III	55
METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Metode Penelitian	55
B. Teknik Pengumpulan Data.....	56
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	58
D. Prosedur Validasi.....	60
E. Instrumen Penelitian	60
BAB IV.....	61
HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	61
a. Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	61
b. Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	62
c. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	62
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	64
a. Kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	64
b. Tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	64
c. Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	66
3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	67

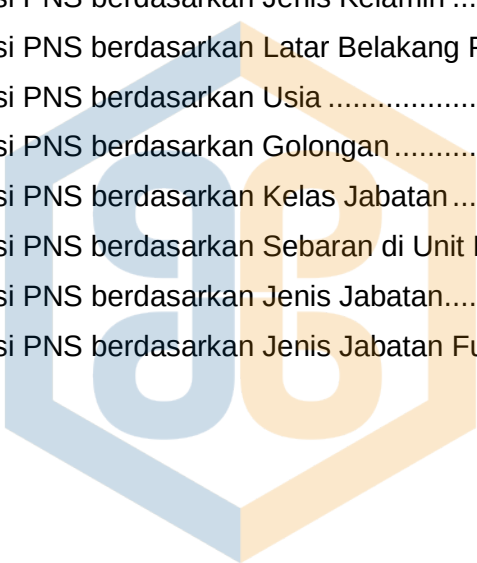
4. Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	73
B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	76
1. Evaluasi Program Persiapan Pensiun di Setjen DPD RI	77
2. Desain Program Persiapan Pensiun di Setjen DPD RI <i>Existing</i>	84
BAB V.....	97
SIMPULAN DAN SARAN	97
A. SIMPULAN	97
B. SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	109
LAMPIRAN	111



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Pensiun Tahun 5	5
Tabel 2.1 Kategori Program Persiapan Pensiun 35	35
Tabel 2.2 Description of Republic of Korea Pension Structure 52	52
Tabel 3.1 Kriteria Narasumber 56	56
Tabel 3.2 Daftar Narasumber 57	57
Tabel 4.1 Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin 73	73
Tabel 4.2 Komposisi PNS berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 73	73
Tabel 4.3 Komposisi PNS berdasarkan Usia 74	74
Tabel 4.4 Komposisi PNS berdasarkan Golongan 74	74
Tabel 4.5 Komposisi PNS berdasarkan Kelas Jabatan 74	74
Tabel 4.6 Komposisi PNS berdasarkan Sebaran di Unit Kerja 75	75
Tabel 4.7 Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan 75	75
Tabel 4.8 Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional 75	75



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Transisi ke Masa Pensiun	26
Gambar 2.2 Proses Perencanaan Pensiun	37
Gambar 2.3 Norway Global Retirement Index.....	50
Gambar 2.4 Republic of Korea Global Retirement Index	52
Gambar 2.5 Model Berpikir	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Setjen DPD RI	67
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Administrasi	68
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Persidangan	69
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kantor DPD RI di Provinsi.....	70



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pegawai Setjen DPD RI

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pegawai merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi. Keberadaannya sangatlah penting bagi keberjalanan organisasi, oleh karena itu organisasi harus memperlakukan dan mengelola pegawainya dengan baik. Pengelolaan pegawai dilakukan agar pegawai yang ada dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan pegawai ini dapat dilakukan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan persiapan pensiun.

Ulia (2020, p.11) mendefinisikan bahwa “pensiun bagi karyawan kantoran berarti berhenti bekerja karena sudah mencapai usia pensiun.” Sedangkan menurut Suardiman (2011, p.133) “pensiun merupakan keadaan dimana pada umur tertentu institusi mengatur untuk karyawannya berhenti dari pekerjaannya.” Dari pengertian-pengertian tersebut pensiun merupakan tahap akhir karir seorang pegawai. Tahap akhir ini menjadi rentan saat dilalui oleh seorang pegawai karena pada tahap ini adalah tahap meninggalkan karir atau tahap meninggalkan kedekatan dengan organisasi yang telah kebersamaan pegawai tersebut dalam jangka waktu yang lama. Masa transisi dari kerja ke pensiun ini seringkali menjadi masalah bagi pegawai jika ia belum siap secara fisik, psikologis, sosial, maupun kemandirian ekonomi. Menurut Sutrisno (2013, p.2) “masa pensiun seringkali menimbulkan rasa tidak berguna bagi individu yang akan memasuki masa pensiun.”

Pada tahap pensiun ini, sebagian orang mengalami gejala ketidaknyamanan atau dikenal juga sebagai *post power syndrome*. Bagi orang-orang yang mengalami gejala ini, berakhirnya masa kerja merupakan sebuah kenyataan yang kurang menyenangkan. Hal ini menyebabkan rasa cemas ketika usia orang tersebut mendekati masa pensiun atau masa purna bakti. Salah satu penyebab timbulnya rasa cemas ini dikarenakan ketidaktahuan orang tersebut mengenai kehidupan

yang akan dihadapinya di masa pensiun. Penyebab lain timbulnya *post power syndrome* ini adalah rasa menurunnya harga diri dikarenakan kekhawatiran hilangnya penghormatan orang lain terhadap dirinya maupun dikarenakan hilangnya fasilitas yang biasa di dapatkan orang tersebut sebelum pensiun. Selain itu gejala ini ada juga yang disebabkan perubahan aktivitas, seseorang yang tadinya aktif dan banyak kegiatan kemudian mendadak hilang aktivitas dan kegiatannya. Kekhawatiran-kekhawatiran diatas yang timbul ketika menjelang masa pensiun dapat menyebabkan berkurangnya kinerja dari seorang pegawai.

Oleh karena sebab-sebab diatas, pada tahap persiapan menghadapi pensiun ini, menurut Abel dan Hayslip (Apsari, 2012, p.49) peran organisasi atau institusi adalah 'membantu karyawannya menghadapi masa pensiun, diantaranya untuk meningkatkan kenyamanan dimasa transisi dari bekerja menjadi tidak bekerja. Kesiapan dan kepercayaan diri karyawan dalam menghadapi pensiun akan mendukung karyawan memiliki keterlibatan dan komitmen pada pekerjaannya menjelang akhir masa kerjanya'.

Di Indonesia, pensiun PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 55 huruf m dijelaskan bahwa manajemen PNS meliputi jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini menunjukan bahwa manajemen pensiun termasuk di dalamnya persiapan pensiun merupakan hal yang diamanatkan dalam undang-undang. Lebih lanjut Pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan suatu skema dalam menghadapi masa pensiun melalui peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 350 diatur mengenai masa persiapan pensiun atau yang biasa dikenal sebagai MPP. Dimana Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dapat mengambil masa persiapan pensiun mulai dari satu tahun sebelum batas usia pensiunnya. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan masa pensiun bagi pegawai

negeri sipil agar pegawai yang bersangkutan memiliki waktu untuk mempersiapkan masa pensiunnya.

Kemudian peraturan pelaksana mengenai hal tersebut diatas tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai beberapa hal. Salah satunya adalah hak keuangan. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa uang masa persiapan pensiun terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Selain uang masa persiapan pensiun, menurut Peraturan BKN ini, PNS diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sejak ditetapkan keputusan pemberian masa persiapan pensiun.

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 ini juga mengatur kewajiban PNS yang menjalani MPP yaitu memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja jika diperlukan.

Lebih lanjut dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa sebelum Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) memastikan PNS yang mengajukan MPP tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, dan telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara dan dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), kepegawaiannya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sebagai salah satu instansi pemerintah selayaknya Setjen DPD RI juga melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan untuk mempersiapkan pensiun bagi PNS. Namun demikian sampai dengan saat

ini pelaksanaan program persiapan pensiun di Setjen DPD RI masih menginduk pada Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pendidikan dan Pelatihan dimana program persiapan pensiun dimasukan sebagai diklat persiapan purnabakti.

Setjen DPD RI saat ini telah memiliki program dalam persiapan pensiun untuk PNS untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran pegawai yang dapat mengurangi komitmen atau kinerja pegawai diakhir masa baktinya, namun sampai saat ini program persiapan pensiun ini belum ada panduan yang jelas dan tertuang dalam peraturan yang mengikat. Selama ini program persiapan pensiun dijalankan oleh Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen DPD RI setiap tahun dengan menyertakan PNS yang 2 (dua) tahun lagi akan memasuki usia pensiun. Program yang telah dijalankan ini mengkombinasikan antara materi/teori yang diberikan oleh narasumber/pakar kemudian dilanjutkan dengan kunjungan dan pelatihan dasar ke beberapa lokasi usaha, baik yang telah berhasil dijalankan oleh pegawai yang telah pensiun maupun yang potensial untuk dijalankan pada saat pensiun seperti peternakan, perkebunan dengan basis hidroponik, kedai kopi/kafe, cuci kiloan (*laundry*), kos-kosan, maupun kesempatan *franchise* kantor pos dan lain sebagainya.

Materi yang diberikan pada kegiatan persiapan pensiun adalah bagaimana bisa tetap berkarya di masa purnabakti, persiapan psikologi di masa purnabakti, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di masa purnabakti.

Selain itu, Setjen DPD RI melalui Bagian Pengembangan SDM juga menjalin kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka memberikan pemahaman melalui seminar/webinar mengenai akses permodalan bagi pegawai yang akan memasuki usia pensiun.

Pada dasarnya, program-program yang telah di jalankan oleh Setjen DPD RI dalam rangka persiapan pegawai dalam memasuki masa pensiun masih perlu dioptimalkan efektifitas keberhasilan programnya. Hal ini terlihat dari belum adanya peserta program yang mengaplikasikan materi yang telah diberikan pada diklat khususnya mengenai wirausaha setelah

mereka pensiun. Hal ini terjadi karena sampai saat ini program yang dijalankan oleh Setjen DPD RI diawali oleh survei awal yang terbatas pada pertanyaan mengenai jenis wirausaha yang ingin dikunjungi atau dipelajari oleh calon peserta diklat. Padahal, mungkin tidak semua pegawai memiliki minat atau membutuhkan pelatihan kewirausahaan. Bisa jadi ada pelatihan-pelatihan lain yang sebenarnya dibutuhkan oleh pensiunan. Jikapun ada yang membutuhkan pelatihan kewirausahaan bisa jadi akan lebih efektif jika pelatihannya lebih pada bagaimana teknis pendirian atau memulai usaha mulai dari memilih usaha, merancang bisnis, pendanaan, sampai dengan manajemen bisnis daripada sekedar kunjungan ke suatu usaha tertentu dalam waktu singkat.

Keberagaman jenis kegiatan yang dibutuhkan oleh calon pensiunan ini dijelaskan oleh Apsari (2012, p. 53) bahwa kebutuhan dari para pegawai yang akan menjalani masa pensiun antara lain dari aspek ekonomi, berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta kewirausahaan. Aspek psikologis yaitu mempersiapkan mental untuk menghadapi perubahan pada saat pensiun. Aspek sosial yaitu bagaimana menyiapkan setelah pensiun tetap memiliki peran sosial dan menyiapkan dukungan sosial ketika pensiun tiba serta aspek fisik berkaitan dengan kesehatan, diantaranya dalam rangka membangun perilaku kuratif untuk menjaga kesehatan dan mengatur pola makan .

Perbedaan-perbedaan kebutuhan ini sebenarnya bisa diidentifikasi diawal sehingga program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran. Hal ini mungkin untuk dijalankan, dikarenakan pegawai yang akan pensiun pertahun jumlahnya dapat dihitung dan tidak terlalu banyak. Pun demikian jika dilakukan evaluasi terhadap pegawai-pegawai yang telah pensiun dan mengikuti program persiapan pensiun. Dari situ bisa terlihat keberhasilan atau kesesuaian program yang dijalankan dengan kebutuhan pegawai yang telah memasuki masa pensiun atau purnabakti.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Pensiun Pertahun

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah	4	5	4	1	10	7	8	9	14	8

Sumber: Diolah dari data kepegawaian Setjen DPD RI

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah pegawai yang akan pensiun pertahun dapat diprediksi atau dihitung. Artinya program persiapan pensiun juga dapat dipersiapkan. Namun demikian, sampai saat ini belum ada bentuk baku, panduan, atau peraturan yang mengatur khusus mengenai persiapan pensiun di internal Setjen DPD RI. Padahal setiap tahun pasti ada pegawai yang pensiun. Jika melihat kecenderungan beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun mereka belum mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan beban kerja yang masih tinggi sehingga mereka tidak terpikir untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Jika melihat kondisi tersebut dan dikaitkan dengan pernyataan Apsari (2012, p.51) bahwa “persiapan pensiun biasanya menjadi terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian dikarenakan meskipun masa pensiun sudah dekat, biasanya karyawan/pegawai masih disibukan dengan tugas dan pekerjaannya”, maka dapat dipastikan bahwa pegawai di Setjen DPD RI tidak sempat memperhatikan dan menjalankan persiapan menghadapi masa pensiun. Maka dari itu sebagaimana yang disampaikan Olson (Avery & Jablin, 1988, p.69) bahwa instansi perlu melakukan intervensi yang terorganisir secara formal yang dirancang untuk membantu karyawan dalam mengambil keputusan tentang pensiun dan menyesuaikan dengan masa pensiun. Sehingga sudah selayaknya Setjen DPD RI mempersiapkan hal tersebut dengan lebih baik salah satunya dengan membuat peraturan persiapan pensiun.

Beberapa penelitian mengenai program persiapan pensiun juga telah pernah dilakukan sebelumnya. berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Leandro-França, et.al (2016) di Negara Brazil terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan 3 (tiga) metode yaitu *testimony*, *short*, dan *extensive* ditemukan bahwa peserta yang mengikuti program dengan metode *extensive* memperlihatkan perubahan yang lebih luas dalam perencanaan pensiun dibandingkan 2 (dua) metode lainnya. Hal ini menunjukan bahwa pendekatan yang terstruktur yaitu metode *extensive* dimana program dilaksanakan secara bertahap selama 13 (tiga belas) pertemuan dengan masing-masing pertemuan dilaksanakan selama 3

(tiga) jam lebih efektif dan optimal daripada dua metode lain yang dilaksanakan secara singkat yaitu selama 3 (tiga) jam dengan pendekatan tidak terstruktur (metode *testimony*) dan terstruktur (metode *short*). Lebih lanjut pada penelitian lain yang dilakukan oleh Apsari (2012) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang harus dipersiapkan dalam program persiapan pensiun yaitu aspek ekonomi terkait mengelola keuangan dan kewirausahaan, persiapan aspek psikologis, persiapan aspek kesehatan fisik, persiapan aspek sosial dengan membangun dukungan sosial serta pemahaman informasi dari organisasi mengenai kebijakan yang terkait dengan pensiun. Dari penelitian yang telah ada tersebut perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Leandro-França, et.al bertujuan untuk membandingkan beberapa program persiapan pensiun yang telah ada sedangkan penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan satu program yang telah ada. Sedangkan perbedaan dengan penelitian dari Apsari adalah pada subjek penelitiannya. Subjek penelitian dari Apsari bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan fenomena dan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui mengapa program persiapan pensiun di Setjen DPD belum optimal serta bagaimana model program persiapan pensiun yang dapat diterapkan di Setjen DPD agar program tersebut berjalan optimal. Dilatarbelakangi oleh permasalahan diatas maka penelitian ini akan mengidentifikasi, mengkaji, menganalisa, serta membuat panduan, petunjuk, atau model program persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Program persiapan pensiun yang dilaksanakan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia belum optimal dan belum mencakup seluruh unsur yang perlu dipersiapkan oleh pegawai saat memasuki masa pensiun.
2. Belum ada panduan atau acuan pelaksanaan program persiapan pensiun di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

C. Rumusan Permasalahan

Bagaimana pengembangan program persiapan pensiun yang baik dan dapat diaplikasikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa program persiapan pensiun di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia belum optimal.
2. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan bagaimana desain pengembangan program persiapan pensiun di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait program persiapan pensiun.
2. Manfaat terhadap dunia praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.